



Kades Pasir Siap Mengganti Kerugian Negara

MEMPAWAH - Kisruh dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2019 di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah

berujung laporan. Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Tim 9 melaporkan dugaan penyimpangan uang negara itu ke Unit Tipikor Polres Mempawah.

Ketua Tim 9, Eddy Iriansyah kepada awak media mengungkapkan, laporan dugaan korupsi dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Pasir itu telah dilaporkannya kepada Tipikor Polres Mempawah sejak Maret 2020. Hingga kini, kasus tersebut terus bergulir sesuai proses hukum yang berlaku.

"Secara hirarki, laporan kasus dugaan penyimpangan dana desa ini sudah kami sampaikan di desa, kecamatan maupun Inspektorat. Termasuk pula ke Unit Tipikor Polres Mempawah. Semua kita lakukan sesuai prosedural," tegas Eddy, Kamis (7/1) di Mempawah.

Eddy memastikan dia dan rekan-rekan lainnya terus mengawal dan mengawasi perkembangan kasus tersebut. Bahkan, dia menyebut laporan telah ditindaklanjuti dengan investigasi dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Mempawah.

"Inspektorat Mempawah sudah melakukan invetigasi dan audit dilapangan. Kabarnya, ada temuan kerugian negara dengan total Rp 600 juta, bahkan bisa lebih besar lagi. Ini sangat memprihatinkan," cecarnya.

Eddy menyebut, dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2019 di Desa Pasir terjadi hampir di seluruh item. Mulai dari pembangunan fisik, non fisik hingga pengelolaan

administrasi.

"Salah satu objek pekerjaan yang kami laporkan ke Tipikor Polres Mempawah adalah pembangunan jembatan di RT 15, Dusun Sebukit Rama. Termasuk pula masalah pengadaan tanah, pembuatan baliho dan lainnya," beber dia.

Saat ini, Eddy mengatakan pihaknya masih menunggu tindaklanjut dari proses hukum yang dilakukan Inspektorat dan Tipikor Polres Mempawah. Usai mendapatkan temuan kerugian negara, maka Kepala Desa Pasir dituntut untuk mengembalikan kerugian tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

"Berdasarkan aturan, kerugian negara ini harus dikembalikan dalam waktu dua bulan. Mudah-mudahan saja kerugian negara ini bisa dikembalikan. Karena ini menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Untuk itu, Eddy memberikan apresiasi terhadap kinerja Inspektorat dan Unit Tipikor Polres Mempawah. Menurut dia, kedua lembaga tersebut sangat kooperatif dan cepat menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Terima kasih pula kepada masyarakat Desa Pasir yang berperan aktif memberikan informasi terkait temuan-temuan dilapangan. Dan kami mohon masyarakat agar bersabar menunggu proses hukum yang sedang berlangsung," tuturnya.

Kepala Desa Pasir, Abdul Hamid

membenarkan beberapa bulan lalu Tim 9 telah membuat laporan ke Tipikor Polres Mempawah terkait dugaan penyimpangan anggaran dana desa tahun anggaran 2019.

"Kami sudah dipanggil dan diperiksa terkait laporan tersebut. Baik saya sendiri, Kepala Dusun, BPD maupun staf sudah memberikan keterangan kepada penyidik," kata Abdul Hamid membenarkan laporan tersebut.

Bahkan, sambung Abdul Hamid, beberapa bulan lalu tim dari Inspektorat telah melakukan proses investigasi dan audit. Pemeriksaan dilakukan terhadap pekerjaan fisik maupun pengelolaan administrasi dana desa di Desa Pasir tahun anggaran 2019.

"Pada tanggal 28 November 2020 telah dilakukan diekspose hasil investigasi dan audit. Tim memang mendapatkan adanya temuan. Kami sudah mengakui dan menerima hasil audit Inspektorat," ujarnya.

Terkait temuan tersebut, Abdul Hamid menegaskan dirinya siap bertanggungjawab penuh. Sesuai petunjuk Inspektorat, maka dirinya diminta untuk mengembalikan kerugian negara sesuai hasil audit.

"Sepanjang kami mampu mengembalikan, maka Inspektorat mempersilahkan kami untuk mengembalikan kerugian negara. Dan pastinya saya siap dan bertanggungjawab penuh untuk mengembalikan kerugian tersebut," pungkasnya. (wah)